

## PERAN PENDIDIKAN POLITIK PADA GENERASI MILENIAL DI KABUPATEN DELI SERDANG

**Suardi**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa  
Email : suardi@dharmawangsa.ac.id

**Umar Hamdan Nasution**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa  
Email : umarhamdan@dharmawangsa.ac.id

**Cut Zahri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmawangsa  
Email : cutzahri@dharmawangsa.ac.id

### ABSTRAK

*One of the special concerns is political education that is still low among millennials. Based on the motivation to prepare the future of the nation and the state and to keep the election running well, and to produce electoral output that has the legitimacy to lead the government, the reasons and motivations for the involvement of millennials related to political education are very important to be identified, with this is expected to produce the right formulation to maximize the role of millennial generation in subsequent elections. To be able to identify the role of political education for millennials as an effort to increase their political participation, one way that can be done is to conduct research. As democracy develops, groups who also want to influence the policy making process emerge. One group of participants in the election is millennial generation. Millennial limits start from the age of 16 years following the determination of the age of young people carried out by the United Nations, while the age limit of young people up to 30 years is based on Youth Law No. 40 of 2009 article 1 concerning: Youth is an Indonesian citizen entering an important period of growth and development aged 16 (sixteen) to 30 (thirty) years. This millennial generation can become a separate force in elections if properly directed*

**Keywords:** Election, Political Education, Millennial Generatio

### PENDAHULUAN

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara khususnya bagi generasi milenial. Lebih dari itu, keduanya satu

sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai intidaridemokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

Di era serba canggih saat ini, kita dituntut untuk berfikir secara cepat dalam hal apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Rakyat mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu Negara, karena sukses atau tidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatas mana partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tersebut. Baik itu pemilihan umum legislatif, presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut selalu terdapat pemilih pemula. Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Setiajid, 2011:19). Berarti kriteria pemilih pemula merupakan mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah atau yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Salah satu peran masyarakat atau pemilih pemula dalam politik adalah memiliki fungsi control terhadap jalannya suatu pemerintahan, dari fungsi inilah sehingga dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat, pemerintah harus mempertimbangkan segala sesuatunya berdasar atas keinginan dan kebutuhan rakyatnya, bukan karena atas dasar keinginan suatu kelompok saja.

Tujuan penulisan ini adalah generasi milenial sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Sehingga generasi milenial sebagai pemilih pemula dan masyarakat secara umum melek politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Adapun manfaat teoritik dari penulisan ini adalah bagi penulis dapat memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam penyusunan sistematika pembuatan paper. Penulis juga

mendapatkan pengetahuan tentang konsep dasar pendidikan politik dalam masyarakat. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangannya dalam penulisan paper ini. Adapun manfaat bagi generasi milenial dan masyarakat luas adalah membentuk generasi milenial dan masyarakat yang tahu dan faham akan kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana generasi milenial dan masyarakat dibekali dengan pengetahuan budaya politik dan diajarkan tentang bagaimana partisipasi seharusnya.

## KERANGKA TEORI

### A. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *politicalsocialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Poerwadarminta (1996:2006), kata pendidikan berasal dari kata “*didik*” yang dapat berarti “*memelihara dan memberi latihan (ajaran,pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran*.” sehingga dalam kata pendidikan itu mengandung beberapa arti,yaitu:

- 1) Perbuatan (hal, cara dan sebagainya);
- 2) Mendidik (ilmu didik dan ilmu mendidik);
- 3) Pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya), badan , batin dan sebagainya.

Ramlan Surbakti memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Ramlan Surbakti (1999) berpendapat bahwa: Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat

mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

David Easton dan Jack Dennis (Suwarma Al Muchtar, 2000) dalam bukunya *Children in the Political System* memberikan batasan mengenai *politicalsocialization* yaitu bahwa "*Politicalsocializationis development process which persons acquire arientation and paternsof behaviour*". Fred I. Greenstain (Suwarma Al Muchtar, 2000) dalam bukunya *Political Socialization* berpendapat bahwa: *Politicalsocialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanne, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquisition of politically relevant personality characteristics.*

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoha untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-- aturan yang berlaku secara sosial. Jika ditelusuri pada berbagai literatur politik yang ada, Pendidikan Politik termasuk bagian proses sosialisasi politik. Walaupun berbeda secara penulisan, baik sosialisasi politik maupun pendidikan politik mempunyai tujuan serta fungsi yang sama secara prinsip. Karena itu dalam penulisan ini baik sosialisasi politik ataupun pendidikan politik dipergunakan bersama tanpa diperdebatkan.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:55), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Selanjutnya untuk tujuan pendidikan politik bagi generasi muda dituangkan dalam Inpres No. 12 Tahun

1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Ramdlon Naning (1982) dan Kartini Kartono (2009) secara khusus menyatakan tujuan pendidikan politik di Indonesia untuk generasi mudanya, sebagai berikut:

1. Membangun generasi muda Indonesia yang sadar poltik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus menerus membangun.
2. Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam seluruh watak atau karakteristik kepribadian Indonesia (tidak lupa jati dirinya, dan tidak mengalami proses alienasi)
3. Meningkatkan partisipasi aktif, kreatif dan dinamis generasi muda dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan dalam politik nasional.

Memberikan bekal kepada generasi muda yang akan meneruskan dan mempertahankan kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa depan dengan nilai-nilai luhur, sikap-sikap, pengetahuan ketrampilan yang diperlukan di masa depan. Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di atas kemajemukan bangsa Indonesia.

Menurut Alfian (1990:245-246), mengidentifikasi pendidikan politik

dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi atukah tidak, diketahui atukah tidak, disadari atukah tidak, hal itu dialami oleh anggota- anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

## B. Pemilih Muda

Menurut Poerwadarminta (1976:314) kata “Muda” adalah belum sampai setengah umur, atau masih muda. Pengertian generasi muda dapat dibedakan dalam beberapa kategori :

1. Biologi : generasi muda adalah mereka yang berusia 12-15 tahun (remaja) dan 15-30 tahun (pemuda).
2. Budaya, generasi muda adalah mereka yang berusia 13-14 tahun.
3. Kerja, yang dibuat oleh Depnaker adalah yang berusia 18-22 tahun.
4. Kepentingan perencanaan pembangunan, yang disebut sebagai sumber daya manusia muda adalah yang berusia 0-18 tahun.
5. Ideologi Politik, generasi muda yang menjadi pengganti adalah mereka yang berusia 18-40 tahun.
6. Lembaga dan lingkungan hidup sosial, generasi muda dibedakan menjadi 3 kategori :
  - a. Siswa, yakni usia 6-8 tahun
  - b. Mahasiswa, yakni usia 18-25 tahun
  - c. Pemuda yang berada diluar sekolah / PT berusia 15-30 tahun.

Menurut Kurniadi (1991:103) generasi muda secara umum dapat dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia,

sebagaimana juga dalam fase-fase lainnya, maka fase generasi muda ini mempunyai cirinya sendiri, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Ciri yang menonjol dari fase generasi muda ini ialah peranannya dalam masa peralihan menuju suatu kedudukan yang bertanggung jawab dalam tatanan masyarakat, antara lain:

- a. Kemurnian idealismenya.
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan baru.
- c. Semangat dan pengabdianya.
- d. Spontanitas dan dinamikanya.
- e. Inovasi dan kreatifitasnya.
- f. Keinginan-keinginannya untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru.
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri.
- h. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

Kemudian menurut Rudini dan Hidayat (1989:156) generasi muda adalah sebagai personifikasi dari satu generasi penerus didalam sistem kehidupan politik yang mengacu kepada pelaksanaan demokrasi pancasila, ia mempunyai peranan yang amat strategis.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini telah dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk tertulis. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden :

1. Apakah anda tahu apa itu Politik ?
2. Apakah anda tahu apa itu Partai Politik?
3. Apakah anda pernah diajak untuk ikut jadi anggota Partai Politik ?
4. Apakah anda tahu bagaimana cara menjadi anggota Partai Politik ?
5. Apakah anda tahu nama dari salah satu Ketua Umum Partai Politik di Indonesia ?
6. Apakah anda tahu apa itu kampanye ?

7. Apakah anda tahu kampanye itu untuk apa?
8. Apakah anda tahu apa itu Pemilihan Umum?
9. Apakah anda tahu Pemilihan Umum itu untuk apa ?
10. Apakah anda tahu kapan Pemilihan Umum akan dilaksanakan ?
11. Apakah anda tahu apa itu Penyelenggara Pemilu ?
12. Apakah anda tahu apa Komisi Pemilihan Umum ?
13. Apakah anda tahu apa tugas Komisi Pemilihan Umum?
14. Apakah anda tahu apa itu Badan Pengawas Pemilihan Umum ?
15. Apakah anda tahu apa tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum ?
16. Apakah anda tahu apa itu Pemantau Pemilu ?
17. Apakah anda tahu apa tugas Pemantau Pemilu ?
18. Apakah anda tahu apa itu Konsultan Politik ?
19. Apakah anda tahu apa tugas Konsultan Politik ?
20. Apakah anda sudah pernah memilih dalam sebuah Pemilihan Umum.

Deskripsi hasil analisis yang telah dilakukan:

- 58.33 % responden sudah mengetahui tentang Pemilihan Politik
- 98% responden sudah mengetahui tentang Partai Politik.
- 63.33% responden pernah diajak untuk menjadi anggota Partai Politik.
- 70% responden tidak mengetahui cara menjadi anggota Partai Politik.
- 58.33% responden sudah mengetahui salah satu Ketua Umum Partai Politik di Indonesia.
- 56.67% responden sudah mengetahui tentang Kampanye.
- 95% responden sudah mengetahui tentang Pemilihan Umum.
- 95% responden sudah mengetahui jadwal Pemilihan Umum.
- 95% responden sudah mengetahui tujuan Pemilihan Umum.
- 76.87% responden sudah mengetahui kapan pelaksanaan Pemilihan Umum.
- 50% responden sudah mengetahui tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 95% responden sudah mengetahui tentang Komisi Pemilihan Umum.
- 83.33% responden sudah mengetahui tentang tugas Komisi Pemilihan Umum.
- 56.67% responden tidak mengetahui tentang BAWASLU.
- 58.33% responden tidak mengetahui tentang tugas BAWASLU
- 80% responden sudah mengetahui tentang apa itu Pemantau Pemilihan Umum.
- 81% responden sudah mengetahui tentang tugas Pemantau Pemilihan Umum.
- 91.67% responden sudah mengetahui tentang konsultan politik.
- 91.67% responden sudah mengetahui tentang tugas konsultan politik.
- 75% responden sudah pernah mengikuti pemilihan umum.

#### KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.
2. Pada kenyataannya kebanyakan generasi milenial di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang bersikap acuh tak acuh walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2019.
3. Para generasi milenial di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang hanya bersifat konvensional, karena partisipasi yang diberikan berbentuk pemberian suara walau bukan karena atas dasar pertimbangan yang matang terhadap pilihan yang dilakukan, hanya sekedar ikut-ikutan.
4. Pendidikan politik yang lemah menyebabkan para generasi milenial di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang hanya sekedar ikut-ikutan dan dengan mudah serta rentan dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu.
5. Untuk mewujudkan partisipasi politik secara maksimal dapat dilakukan dengan mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi politik secara

berkala menggunakan agen politik (keluarga).

6. Perlunya perhatian pemerintah dan *stakeholder* dalam mengoptimalkan peran agen pendidikan sebagai mitra bagi pelaksanaan pendidikan politik dimulai dari keluarga, sekolah dan lingkungan sekitar.
7. Diharapkan agar generasi milenial lebih terlibat aktif dalam sosialisasi pendekatan yang tepat harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu agar dapat menyentuh langsung bagi generasi milenial dan mereka mendapat informasi yang cukup mengenai pemilu itu sendiri supaya dapat mengerti dan memahami.
8. Di harapkan juga agar pihak-pihak yang terkait seperti Pemerintah Daerah, KPU, Bawaslu dan Partai Politik dapat memberikan sosialisasi politik secara efektif dan sering melakukan seminar/seminar sejak dini untuk pengenalan tentang pendidikan politik secara umum.

## REFERENSI

- Annan, Koffi A. 2012. *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide*. Geneva: Koffi Annan Foundation; International IDEA.
- Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Kumpulan Karangan, PT. Gramedia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*,. Jakarta: Konpress.
- Chotijah, *Strategi Komunikasi KPU Kabupaten Garut dalam Sosialisasi Pemilu 2014 kepada Kelompok Disabilitas Kabupaten Garut*, Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian Vol. 4; No. 1; Tahun 2018: 24-41
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Lampung: Kencana Prenada. ERI. 2015. *Evaluasi Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden 2014*. Jakarta: ERI.
- Lisma, Lita Tyesta A.L.W, *Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015*, Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017.
- Naning, Ramdlang, 1982, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Liberty, Jakarta
- Ismuhar Ramadhan, *Sosialisasi Politik DPD PKS pada Pemilu Legislatif Tahun 2009*, Jurnal POLITEIA, Vol.5, No.2, Juli 2013.
- Kantaprawira, Rusadi, 2004, *Sistem Politik indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Sinar baru Algensindo, Bandung.
- Kotarumalos, Amir, interview by *Republika*. 2014. *Jelang Pilpres, Pelanggaran Pemilu Harus Diantisipasi (Mei15)*. Accessed 423, 2016. <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/beritapemilu/14/05/15/n5ljra-jelang-pilpres-pelanggaran-pemilu-arus-bawah-harus-diantisipasi>.
- Rakhmat, Jalaludin. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet ke-1.
- Rudini & Hidayat. 1989, *Sistem Politik Kehidupan Generasi Muda*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiono, 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung. Alfabeta
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama, 1992.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum
- Tia Subekti. 2014. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013*. Malang.
- Undang Undang No. 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, Dan Penerapan  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
Undang Undang No. 22 tahun 2007 Tentang  
Penyelenggara Pemilihan Umum  
Undang Undang No. 8 tahun 2012  
Tentang Pemilu Anggota DPR,  
DPD dan DPRD

